

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk khususnya pada daerah perkotaan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari sesuai dengan berkembangnya zaman. Pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut tidak terlepas dari aspek lingkungan, aspek sosial, kependudukan, ekonomi, lingkungan hingga aspek politik. Perkembangan inilah yang menuntut adanya pemenuhan sarana infrastruktur yang baik bagi keberlangsungan aktivitas perkotaan. Sehingga permintaan jumlah lahan untuk melakukan aktivitas pembangunan juga akan semakin bertambah. Namun, pemenuhan lahan pada pembangunan cenderung mengikuti permintaan pasar yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut akan membawa dampak besar terhadap kegiatan sosial ekonomi pada masyarakat. Selain permasalahan ekonomi sosial yang terjadi di masyarakat maka permasalahan seperti diperlukannya jumlah lahan untuk melakukan aktifitas juga akan semakin bertambah.

Disisi lain suatu Kota yang memiliki gelar tersendiri pastinya akan memberikan dampak yang akan menjadikan alih fungsi Kota menjadi beragam seperti Pemerintahan, Perdagangan, jasa dan Industri. Kota Yogyakarta sendiri merupakan salah satu Kota yang memiliki Predikat sebagai Kota Pendidikan dan Kebudayaan. Dari predikat yang dimiliki Kota Yogyakarta tersebut maka akan menjadi daya tarik untuk mendatangkan penduduk yang berasal dari luar daerah Yogyakarta untuk berkunjung, bahkan bukan hanya untuk berkunjung melainkan untuk menetap

di Kota Yogyakarta. Hal tersebut akan memicu adanya persaingan dalam penggunaan tanah yang tak terhindarkan (SeMedan.com, 2017).

Menurut Lestari dalam Mustofa (2011: 1) menjelaskan alih fungsi lahan merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan lahan dari manfaat lahan awal menjadi manfaat lain yang memiliki efek negatif bagi lingkungannya atau pun potensi dari lahan tersebut. konversi lahan juga bisa di artikan sebagai memanfaatkan lahan untuk fungsi yang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu lahan tersebut digunakan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah populasinya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih bermutu. Dengan adanya perkembangan yang terjadi didalam Kota maka dampak dari perkembangan tersebut juga akan dirasakan oleh daerah-daerah disekitarnya. Dalam hal ini yaitu meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Dinas Pertanian DIY, Sasongko mengatakan dalam setiap tahunnya DIY mengalami alih fungsi lahan pertanian mencapai 200-250 hektare per tahun. Beliau mengatakan banyaknya areal sawah menjadi alih fungsi menjadi aneka fungsi. Dalam pengalihan fungsinya tersebut sebagian besar menjadi fungsi perumahan. Angka tersebut didasari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” (TribunJogja.com, 2017).

Jumlah penurunan jumlah lahan pertanian yang sangat besar dalam setiap tahunnya maka Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwon X membuat perda untuk membatasi jumlah alih fungsi lahan pertanian. Perda yang di buat tersebut didalamnya mengatur tentang pembatasan jumlah alih fungsi lahan pertanian yang mana dalam jangka waktu tahun 2011-2021 ada 35 ha

ribu lahan pertanian tidak dapat untuk di alih fungsikan, hal ini bertujuan untuk memenuhi sektor pangan di DIY.

Untuk mengatasi adanya alih fungsi lahan yang meningkat dalam setiap tahunnya maka pemerintah di DIY mengeluarkan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didalamnya tertulis bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di DIY harus mencapai 35.911,59 ha. Jumlah tersebut dibagi dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Untuk Kabupaten Sleman 12.377,59 ha, Kabupaten Bantul 13.000 ha, Kabupaten Kulon Progo 5.029 ha dan Kabupaten Gunungkidul 5.505 ha.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman luas lahan pertanian Kabupaten Sleman pada Tahun 2014 mencapai 52.232 hektare sedangkan pada Tahun 2015 luas lahan pertanian Kabupaten Sleman berkurang menjadi 50.456 hektare. Dengan berkurangnya lahan pertanian yang signifikan diatas maka, wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengakui bahwa adanya konversi lahan pertanian untuk dijadikan lahan non pertanian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah lahan pertanian. Dari penjelasan di atas maka secara jelas peralihan lahan pertanian digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakatnya.” (Stiawan, 2017.)

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Suswandi Aziz mengatakan pada Tahun 2016 produksi tanaman padi di Kabupaten Sleman mencapai 6,2 ton gabah kering giling setiap hektarnya. Akan tetapi dengan fenomena jumlah lahan pertanian yang berkurang sekitar 100 hektare setiap tahunnya maka setiap tahun penurunan produksi gabah mencapai 6.200 ton gabah kering giling (Pressreader.com, 2017).

Berdasarkan keterangan Azis (2017) mengatakan bahwa Lahan pertanian pangan di DIY terus menyusut setiap tahunnya. Lahan pertanian pangan di Sleman dan Bantul, dua kabupaten yang selama ini menjadi sentra produksi pangan di DIY menyempit lebih cepat dibandingkan wilayah lain seperti Gunungkidul dan Kulonprogo. Penyusutan tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian pangan yang semakin tidak terkendali. Umumnya, lahan tersebut dialihfungsikan menjadi pertokoan, hunian, klinik kesehatan, dan usaha transportasi. Sebagai akibatnya, produksi padi di DIY pun terus menurun dan jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka pada 2025 nanti DIY terancam mengalami krisis pangan. Sementara itu, kebutuhan pangan di DIY begitu besar mengingat statusnya sebagai pusat pendidikan dan tujuan destinasi wisata di Indonesia.

Jumlah produksi beras yang bergantung kepada jumlah lahan pertanian akan berubah dengan adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Hal ini sangat memiliki kaitan yang kuat dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat akan mempengaruhi jumlah pangan yang dibutuhkan di suatu daerah. Berdasarkan kepada permasalahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ketahanan pangan disuatu daerah dapat berubah dan terancam yang diakibatkan dengan adanya peralihan lahan pertanian yang dirubah menjadi lahan non pertanian. Faktor lain yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan yaitu jumlah penduduk yang ada di suatu daerah itu sendiri. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul “ Dampak Negatif Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sleman Tahun 2017”

1.2 Rumusan masalah

Sesuai pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana dampak negatif alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2017 ?**

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak negatif alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat

1. Manfaat secara teoritis yaitu agar hasil penelitian ini bisa menjadi informasi dalam mempelajari pesatnya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang berdampak kepada menurunnya ketahanan pangan.
2. Manfaat secara praktis yaitu agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Pertanian, Pangan, dan Pangan Kabupaten Sleman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Sleman dalam mengatasi permasalahan adanya konfersi lahan pertanian menjadi non pertanian.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan skripsi yang sama dengan penelitan sebelumnya, maka penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2014) dengan judul “Dampak konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perkotaan,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.” Dalam penelitiannya di ketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan yaitu terus bertambahnya jumlah populasi manusia, dengan terus bertambahnya jumlah manusia maka akan semakin banyak hal yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Penelitiannya dilakukan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana perubahan penggunaan lahan, faktor penyebab terjadi alih fungsi, pengaruh alih fungsi terhadap pendapatan petani dan kondisi sosial ekonomi. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menggambarkan sebagian besar peralihan penggunaan lahan tersebut menjadi kos, ruko dan tempat usaha, salah satu faktornya yaitu adanya pertambahan jumlah penduduk yang meningkat pada tahun 2002, adanya alih fungsi lahan tersebut menyebabkan peralihan mata pencaharian masyarakatnya dari sektor pertanian menjadi usaha tempat makan, laundry, warnet dan tempat rental kendaraan. Dengan adanya perubahan mata pencaharian tersebut maka pendapatan masyarakatpun lebih besar, oleh sebab itu perubahan ekonomi masyarakat yang menjadi lebih baik tersebut memberikan dampak yang positif dengan adanya ronda malam dan kegiatan rutin gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhadi (2010) yang berjudul “Strategi pengembangan ketahanan pangan : Studi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian tersebut di ambil karena melihat adanya pergeseran pembangunan ketahanan pangan, masih terdapat daerah rawan pangan gizi, masih terdapat alih fungsi lahan pertanian dan masih

kurangnya kepedulian masyarakat dan produsen terhadap keamanan makanan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan responden dan responden tersebut merupakan orang-orang yang memahami tentang ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Bantul. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu hal yang dilakukan dalam mempertahankan pangan di Kabupaten Bantul yaitu dengan cara adanya kualitas kerjasama yang baik, menambah jumlah distribusi pangan, adanya sistem cadang pangan, partisipasi dan keberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan. Pelaksanaan strategi tersebut perlu adanya kerjasama dengan pemerintah pusat, pihak yang berkaitan, dan diperlukannya dukungan peraturan dari sektor politik, kesehatan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah membuat daya beli masyarakat yang lebih baik tidak lupa juga adanya pengecekan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Karini (2013) yang berjudul “dampak aih fungsi lahan terhadap produksi beras dalam rangka ketahanan pangan studi kasus di Kabupaten Tangerang” mengatakan bahwa sejak tahun 2009-2011 Kabupaten Tangerang telah mengalami alih fungsi lahan sebesar 2.043 Ha dengan rata-rata dalam setahun mengalami penyusutan sebesar 1.021,5 Ha. Perubahan alih fungsi lahan dari yang terluas yaitu sawah irigasi teknis, tadah hujan, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana. Dalam penelitiannya mengatakan meningkatnya populasi penduduk merupakan faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Tangerang. Permasalahan lainnya yang menjadi faktor terjadinya konversi lahan yaitu adanya pembangunan infrastruktur, perumahan, daerah perindustrian dan lainnya. Hasil dari

penelitiannya mengatakan bahwa dari adanya alih fungsi lahan sawah menjadi non persawahan belum membuktikan adanya penurunan produksi padi di Kabupaten Tangerang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik peningkatan produksi padi hingga Tahun 2015. Akan tetapi jika dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Tangerang sendiri masih mengalami kekurangan beras yaitu sekitar 16,28 % per tahun, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tangerang masih melakukan impor beras dari Daerah lainnya.

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hariono (2014) yang berjudul “strategi pengembangan agribisnis komoditas padi dalam meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Jember” mengatakan bahwa pokok utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Menganalisis ketahanan, potensi, kekurangannya dan ancaman untuk meningkatkan komoditas padi dalam strategi menyediakan ketahanan pangan yang lebih baik.
 - b. Membuat analistik, jalan alternatif cara yang cocok dalam meningkatkan komoditas padi dalam strategi menyediakan ketahanan pangan yang lebih baik.
 - c. Menentukan pokok utama cara yang harusnya dijadikan dalam meningkatkan komoditas padi dalam strategi penyediaan ketahanan pangan yang lebih baik.
 - d. Menyarankan solusi dalam membuat kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang lebih baik.

Dalam penelitiannya mengatakan kekuatan pemerintah Kabupaten Jember yaitu terletak pada motivasi petani mereka, adapun kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember yaitu terletak pada kondisi finansial. Dalam mengatasi permasalahan yang ada maka pemerintah Kabupaten Jember memiliki strategi alternatif yaitu lebih fokus pada usaha tani padi, diperkuat

sinergi antara petani, pengusaha dan pemerintah, lebih ditingkatkan lagi peraturan tentang pangan daerah yang lebih condong kepada petani, pembaharuan dan yang terakhir yaitu adanya difrensiasi produk.

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Handari (2012) yang berjudul “implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang” penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi dan faktor yang mempengaruhi serta strategi pencapaian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukannya ini menunjukkan bahwa aspek ekologi dan cara lain alih fungsi lahan air dan tanah berada pada fokus pertama. Dengan ini menunjukkan bahwa penjagaan terhadap sustainable lahan pertanian sangat memiliki kaitannya dengan keadaan lingkungan yang baik. Akibat dari kerusakan tanah ini tidak memiliki pengaruh langsung bagi hasil pertanian, tetapi jika tidak ada upaya alih fungsi lahan, produktivitas lahan pertanian yang besar serta upaya dari lahan pertanian tidak akan berkelanjutan. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa suatu system pertanian konservasi merupakan cara yang tepat dalam pemulihan dan kelestarian lingkungan.
6. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jamal (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga lahan sawah pada proses alih fungsi lahan sawah ke-penggunaan non pertanian, studi kasus di beberapa Desa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada saat ini konversi pada lahan pertanian menjadi lahan yang bukan bersifat pertanian merupakan suatu pilihan yang rasional bagi petani, hal ini disebabkan karena hasil dari usaha tani itu sendiri kurang

memadai dalam mencukupi kehidupan mereka. Hasil dari penelitian yang telah dilakukannya atas dasar dari sebagian Desa yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dari 90 orang petani yang sawahnya di alih fungsikan, dijelaskan bahwa harga jual yang diberikan kepada petani lebih banyak memikirkan faktor letak pada jalan utama dan status penguasaan lahan. Faktor kondisi irigasi dan produktifitas lahan tidak berpengaruh dengan signifikan terhadap nilai jual lahan tersebut, demikian juga penyebab lingkungan lainnya. Didalamnya dijelaskan jika memberikan seluruhnya pemanfaatan lahan kepada mekanisme pasar maka akan menimbulkan dampak lahan pertanian yang subur akan semakin terancam keberadaannya. Dengan permasalahan yang ada maka pemerintah dalam menyelesaikan permasalahannya pemerintah mengeluarkan peraturan yang berkaitan, namun karena tidak adanya konsisten peraturan yang ada belum dapat melindungi lahan sawah. Penulisnya pun menjelaskan bahwa untuk kedepannya diperlukannya kebijakan yang kuat mengenai permasalahan alih fungsi lahan.

Setelah mengkaji secara mendalam dari beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan Alih Fungsi Lahan pertanian menjadi non pertanian, penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana proses mempertahankan lahan persawahan mereka dan sebagian besar penulis terdahulu membahas tentang faktor yang memengaruhi petani melakukan alih fungsi lahan. Dengan itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu tentang dampak negatif alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Sleman dikarenakan Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang tinggi, Di Kabupaten

Sleman terdapat beberapa perguruan tinggi, dengan itu maka banyak menimbulkan pembangunan. Pembangunan ekonomi yang tinggi dan memiliki beberapa perguruan tinggi maka akan menciptakan pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan fasilitas yang ada di Kabupaten Sleman banyak menggunakan lahan pertanian, mengingat Kabupaten Sleman adalah lumbung pangan di Provinsi Yogyakarta. Sehingga penelitian Dampak Negatif Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman akan memperkaya kajian dan pengetahuan menjadi penting untuk diteliti.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Alih Fungsi Lahan

Menurut Siswanto (2006) mengatakan bahwa perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan yang lainnya yang diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, yang pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya dan yang kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Menurut Witono (2005) mengatakan lahan pertanian sawah adalah lahan pertanian yang paling mudah dalam perubahan alih fungsinya. Hal ini disebabkan karena :

- a. jenis pertanian yang ada di pedesaan lebih banyak pada lahan pertanian, dibandingkan dengan lahan pertanian kering.

- b. Kebanyakan lokasi persawahan dekat dengan perkotaan
- c. Adanya gaya pembangunan pada masa sebelumnya yang mengatakan pembangunan pada lahan persawahan lebih baik daripada lahan kering.
- d. Adanya pembangunan fasilitas tempat tinggal, perindustrian dan yang lainnya dinilai lebih cepat pembangunannya pada kawasan yang datar, dengan lahan yang datar tersebut maka lahan persawahan sebagian besar pada lokasi kawasan yang datar.

Menurut Fauziah (2005) mengatakan permasalahan konversi lahan di Indonesia muncul tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang baik dalam hal ketentuan yang kurang tegas serta jelas, serta adanya pemberian izin yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam menggunakan lahan. Hal lainnya yaitu disebabkan oleh sektor pertanian yang kurang menarik sulit mendapatkan pupuk dan mahalnyanya peralatan yang diperlukan dalam produksi pertanian tersebut. serta diperkuat dengan harga hasil pertanian yang tidak sesuai dengan biaya perawatan perkebunan, hal ini mengakibatkan ketertarikan penduduk terhadap sektor pertanian menjadi menurun.

Menurut Lestari (2009) mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, yaitu :

- a. Faktor eksternal

Hal ini terjadi akibat ekonomi dan demografi serta pertumbuhan yang terus terjadi pada perkotaan.

- b. Faktor internal

Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan didalam keadaan ekonomi dan sosial rumah tangga pertanian penggunaan lahan.

c. Faktor peraturan pemerintah

Hal ini mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki kaitannya dengan pemanfaatan lahan pertanian. Dalam hal ini kelemahan yang ditemukan yaitu dapat berupa lemahnya kekuatan hukum, hukuman bagi pelanggar, dan ketepatan pada larangan lahan untuk di alih fungsikan.

Dengan beberapa penyebab konversi lahan yang semakin bertambah jumlah dalam setiap tahunnya. Hal ini mengkhawatirkan dikarenakan terbatasnya luas lahan pertanian di negara kita, sedangkan permintaan pangan terus bertambah dengan dibarengi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Jika pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya maka pemerintah akan melakukan Impor beras.

Berdasarkan para ahli di atas dapat kita lihat bahwa alih fungsi lahan adalah adanya pergeseran emanafaatan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang mana dari pergeseran pemanfaatan lahan tersebut lebih banak menimbulkan dampak yang negatif, adanya alihfungsi lahan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1.6.2Ketahanan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Didalam Undang-Undang tersebut pembangunan pangan ada pada cara ketahanan pangan (*food*

security). cara tersebut di ambil dari FAO yang di artikan berdasarkan bagaimana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakatnya. Didalamnya memiliki empat pilar, yaitu : aspek konsumsi, stabilitas, keterjangkauan dan aspek ketersediaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan bahwa ketahanan pangan merupakan tercukupinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, hal itu dengan tujuan untuk menunjang hidup yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Definisi ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut merupakan sebagai penyempurnaan dan pengkayaan cakupan dari definisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang memasukkan perorangan dan sesuai keyakinan agama serta budaya bangsa.

Dengan adanya sistem ketahanan pangan tersebut maka akan menunjukkan bagaimana ketersediaan pangan yang mencukupi dan kemampuan dalam daya beli oleh masyarakatnya. Dengan itu maka akan mewujudkan diversifikasi pangan yang bersifat konsumsi maupun produksi.

Suyastiri (2008 : 4) mengatakan hal yang harus diperhatikan dalam pencapaian pangan yaitu meliputi aspek pengelolaan stok, pengaturan dan produksi serta menyediakan pangan yang mencukupi masyarakatnya. Suyastri juga menambahkan yang harus diperhatikan dalam ketahanan pangan adalah bagaimana kualitas gizi yang terbaik untuk di terima bagi warganya. Kualitas pangan yang berkualitas maka akan berpengaruh

terhadap sumber daya masyarakat Indonesia. Dengan pernyataan tersebut maka perlunya perlindungan lahan pertanian dengan dibuatnya regulasi oleh pemerintah seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Pangan yang disediakan oleh pemerintah harus meliputi empat aspek yaitu : aspek konsumsi, stabilitas, keterjangkauan dan aspek ketersediaan. Dengan memenuhi ke empat aspek tersebut maka pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana kondisi dari pangan yang disediakan harus menjamin mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, hal itu dengan tujuan untuk menunjang hidup yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

1.6.3 Dampak Alih Fungsi Lahan

Menurut Widjanarko, *et al* (2006) mengatakan dampak negatif yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah lahan persawahan yang semakin berkurang dan mengakibatkan menurunnya jumlah produksi padi, hal ini menyebabkan terganggunya swasembada pangan.
2. Dengan berkurangnya lahan persawahan maka akan menimbulkan pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang dikhawatirkan dari permasalahan ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak terserap. Kecemburuan sosial dan konflik sosial akan ditimbulkan dari adanya pengangguran tersebut.

3. Dampak krisis ekonomi menyebabkan kegagalan bagi investor dalam melakukan pembangunan perumahan maupun industri atau adanya kesalahan perhitungan dalam pemanfaatan lahan dan hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah lahan tidak terpakai yang yang dapat menyebabkan timbulnya konflik sosial.
4. Ekosistem sawah berkurang terutama yang berada di jalur pantai utara pulau Jawa. Sedangkan dalam pembuatan lahan sawah baru membutuhkan biaya yang tidak murah seperti contohnya di Kalimantan Tengah dan hasilnya pun kurang memuaskan.

Sumaryanto (2005) mengatakan banyak beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan yaitu seperti, ekonomi petani tidak stabil, ketahanan pangan nasional menurun, bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Dampak lainnya adalah seperti kerusakan pada ekosistem sawah, adanya perubahan budaya agraris menjadi budaya urban, dan hal ini bisa menimbulkan kriminalitas.

Furi (2007) menjelaskan bahwa konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian (sektor informal). Menurut Ruswandi (2007) beberapa konsekuensi yang akan terjadi dari alih fungsi lahan adalah berkurangnya jumlah lahan terbuka hijau hal ini menyebabkan terganggunya lingkungan air, dan menyempitnya lahan pertanian.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk lahan pertanian menjadi tempat pembangunan bangunan atau yang lainnya. Sedangkan Secara umum ketahanan pangan bisa di definisikan menjadi kesanggupan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dari waktu ke waktu. Kecukupan ini meliputi kualitas dan kuantitas pangannya, baik yang didapatkan dari hasil produksi sendiri maupun yang diperoleh dari pasar.

1.7.3 Dampak Konversi Lahan

Dampak Konversi lahan merupakan suatu hasil dari adanya pergeseran dari sektor pertanian ke non-pertanian yang didalamnya akan jika dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak positif namun kenyataannya yang ada sebagian besar dampak yang ditimbulkan yaitu dampak negatif.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan persawahan, seperti yang telah dijelaskan oleh Widjanarko (2006) dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah produksi padi
2. Menimbulkan Konflik Sosial
3. Meningkatkan jumlah lahan tidur
4. Berkurangnya ekosistem sawah

1.9 Metode Penelitian

Menurut Furchan (2004) analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Analisis deskriptif dapat digunakan pada berbagai jenis penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Burhan dalam Nasution (2011 : 25) mengatakan penelitian deskriptif analisis adalah jenis penelitian mengenai data yang di kumpulkan dari gambar, kata-kata, laporan penelitian yang menggunakan kutipan atau bisa juga memberi gambaran dalam penyajian laporan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan keinginan penulis untuk mendalami penelitiannya. Oleh sebab itu, yang telah diteliti oleh penulis yaitu bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sleman setelah adanya pemanfaatan lahan pertanian menjadi non-pertanian.

Pendekatan yang bersifat kualitatif ini dilakukan dengan cara dilakukannya wawancara dengan informan yang dapat memberikan informasi yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil dari wawancara ini kemudian dicatat dan diteruskan dalam bentuk sebuah laporan yang dikembangkan dan kemudian diselesaikan dengan analisa dan interpretasi data.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Sleman.

3. Jenis Data

a. Data primer

Adalah data yang didapatkan pada waktu penelitian. Data tersebut didapatkan dalam bentuk dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Tabel 1.1
Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Sleman	Dinas pertanian Kabupaten Sleman	wawancara
2	Permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman.	Dinas pertanian Kabupaten Sleman	wawancara
3	Jumlah luas lahan yang tidak terpakai di Kabupaten Sleman	Dinas pertanian Kabupaten Sleman	wawancara
4	Jumlah ekosistem persawahan di Kabupaten Sleman	DPMPPT Kabupaten Sleman	wawancara

b. Data skunder

Adalah data yang didapatkan dari tulisan yang telah ada maupun informasi yang telah tersedia sebelumnya. Data tersebut dapat diperoleh melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ), Jurnal, buku, peraturan-peraturan, website resmi dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tabel 1.2
Data Alih Fungsi Lahan Pertanian

No	Nama Data	Sumber
1	Laporan jumlah produksi hasil pertanian di Kabupaten Sleman	Dinas pertanian Kabupaten Sleman
2	Laporan permasalahan yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman.	Dinas pertanian Kabupaten Sleman
3	Laporan jumlah lahan yang tidak terpakai di Kabupaten Sleman	Dinas pertanian Kabupaten Sleman
4	Laporan jumlah lahan pertanian di Kabupaten Sleman	DPMPPT Kabupaten Sleman

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak instansi dan individu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak Dinas yang berwenang yang

terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Sleman.

Tabel 1.3

Data Narasumber Wawancara

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	Bapak Ir. Sumarno	Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan
2	Ibu Ir. Susi Purwaningsih MMA	Seksi Ketersediaan Pangan
3	Bapak Iwan SH.	Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah data-data tertulis yang dimiliki oleh dinas-dinas yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan ini. Dengan studi kepustakaan yang ada maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam penelitian yang nantinya akan memperkuat dari hasil data wawancara yang telah dilakukan.

Tabel 1.4

Studi Kepustakaan Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1	Data statistik tanaman pangan di Kabupaten Sleman Tahun	Bagian tanaman pangan Kabupaten

	2010-2017	Sleman
2	Dokumen laporan jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2016	Bagian tanaman pangan Kabupaten Sleman
3	Data proyeksi ketersediaan komoditas pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2017- Tahun 2020.	Bagian ketahanan pangan Kabupaten Sleman
4	Data izin peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman Tahun 2016– Tahun2017.	DPMPPT Kabupaten Sleman

5. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong dalam Nasution (2013: 31) mengatakan bahwa proses pengelompokan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar dengan itu maka akan ditemukan tema serta yang disaran oleh data yang didapat.

Dalam melanjutkan penyusunan data tersebut maka penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hal ini dengan cara memaparkan keseluruhan data yang didapatkan dari hasil penelitian kemudian dilakukan reduksi data dengan itu di lanjutkan dengan menginterpretasi data yang didapat dan kemudian diberikan kesimpulan dari data tersebut. Dalam penelitian tentang dampak negatif alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan, penulis melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian, tahapan tersebut adalah :

1. Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan oleh penulis akan dikumpulkan dan disusun secara urut dan sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustakan dan lain-lainnya.
2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori, dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian
3. Selanjutnya penyusunan instrument penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena penulis mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.
4. Tahapa selanjutnya penulis mengumpulkan data skunder dan data primer.
5. Saat akan melakukan pengolahan data maka penulis harus mempunyai data skunder dan primer. Yang mana data skunder dan primer tersebut akan di sinkronkan, sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.
6. Analisis data merupakan tahapan untuk menganalisis, mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang data dalam satu cara hingga dapat mendapatkan data yang mngerucut yang mana pada hasil akhirnya dapat digambarkan.
7. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang teliti, atau mungkin mengecek dengan data yang lain perlu juga diingat bahwa

menambah data berarti perlu dilakukan reduksi data dan penarikan kesimpulan lainnya.